**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 25328-25335

# COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REVITALISASI PASAR LEMABANG DI PALEMBANG

**Rahma Dania[1] Cahya Quratul Nabila[2] Nurmah Semil[3] Atrika Iriani[4]**

[1,2,3,4]**program studi administrasi publik universitas sriwijaya**

e-mail korespondensi: zahraviramaulidina@gmail.com

Published: Mei , 2026

## ABSTRAK

Revitalisasi pasar tradisional merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola aset ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan revitalisasi Pasar Lemabang di Kota Palembang dalam perspektif manajemen sektor publik dengan pendekatan *collaborative governance*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar telah melibatkan berbagai aktor, namun belum optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi, pengawasan, dan kepatuhan pedagang. Dengan demikian, keberhasilan revitalisasi sangat bergantung pada efektivitas fungsi manajemen, terutama dalam koordinasi, komunikasi, dan pengawasan antar aktor.

**Kata kunci:** manajemen sektor publik, collaborative governance, revitalisasi pasar

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu aset strategis dalam pengelolaan sektor publik, khususnya dalam penyediaan layanan ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial serta penggerak ekonomi rakyat. Dalam perspektif manajemen sektor publik, pasar tradisional menjadi objek pengelolaan yang memerlukan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi agar mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan pasar tradisional masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Kondisi tata ruang yang tidak tertata, lingkungan yang kurang bersih, fasilitas yang belum memadai, serta lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa fungsi manajemen belum berjalan secara efektif. Hal ini menegaskan bahwa persoalan pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas pengelolaan sektor publik secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, pengelolaan pasar merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dalam kajian administrasi publik, tindakan tersebut dipahami sebagai bagian dari pilihan strategis pemerintah dalam menangani persoalan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa *"kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan"* (Dye, 2013). Dengan demikian, revitalisasi pasar tradisional dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan yang ada.

Salah satu contoh kasus dapat ditemukan pada Pasar Lemabang di Kota Palembang. Pasar ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, namun dalam

pengelolaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti pedagang yang berjualan di badan jalan, kemacetan lalu lintas di sekitar pasar, serta kondisi lingkungan yang kurang tertata. Selain itu, pemanfaatan fasilitas pasar juga belum optimal, sehingga mengurangi kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi manajemen, khususnya pada aspek pengendalian, koordinasi, dan pengawasan.

Dalam konteks manajemen sektor publik, pengelolaan pasar tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai aktor, seperti pengelola pasar, pedagang, sektor swasta, aparat keamanan, serta masyarakat. Keterlibatan banyak pihak ini menuntut adanya sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan secara efektif. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis.

Konsep *collaborative governance* menekankan pentingnya keterlibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara bersama-sama. Chris Ansell dan Alison Gash menjelaskan bahwa *"collaborative governance merupakan suatu pengaturan pemerintahan di mana lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif"* (Ansell & Gash, 2008). Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sektor publik sangat bergantung pada kualitas interaksi dan kerja sama antar aktor yang terlibat.

Lebih lanjut, dalam konteks manajemen kolaboratif, keberhasilan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor, tetapi juga oleh kualitas hubungan antar pihak. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa *"kepercayaan merupakan komponen penting dalam keberhasilan kolaborasi"*. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan komitmen bersama, proses kolaborasi akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, pendekatan manajemen sektor publik modern juga menuntut adanya pengelolaan yang lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil. Christopher Hood dalam konsep *New Public Management* menekankan bahwa pengelolaan sektor publik perlu dilakukan dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta fokus pada kinerja. Dengan demikian, pengelolaan pasar tradisional tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Dalam kasus Pasar Lemabang, program revitalisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas manajemen pasar secara keseluruhan. Upaya tersebut mencakup penataan pedagang, pengaturan zonasi kios, pengelolaan fasilitas umum, serta penataan lalu lintas di sekitar pasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan, kurang optimalnya pengawasan, serta belum efektifnya koordinasi antar instansi terkait.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam revitalisasi pasar terletak pada aspek manajerial, yaitu bagaimana mengelola sumber daya, aktor, dan proses secara terpadu. Keberhasilan pengelolaan pasar sangat bergantung pada kemampuan pemerintah sebagai manajer publik dalam mengoordinasikan berbagai pihak, membangun komunikasi yang efektif, serta memastikan bahwa setiap program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendekatan kolaboratif dalam manajemen sektor publik juga menekankan pentingnya proses perencanaan bersama, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menyatakan bahwa *"keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh keterlibatan bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak secara kolektif"*. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan komitmen dan kemampuan dari seluruh aktor yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis revitalisasi Pasar Lemabang di Kota Palembang dalam perspektif manajemen sektor publik dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses manajemen kolaboratif dijalankan, bagaimana peran masing-masing aktor dalam pengelolaan pasar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan revitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan praktik manajemen sektor publik yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

# TINJAUAN PUSTAKA

### *Manajemen Sektor Publik*

Manajemen sektor publik pada dasarnya merupakan proses pengelolaan organisasi pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pengelolaan ini mencakup pengaturan sumber daya, pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Christopher Hood, perkembangan manajemen sektor publik modern menekankan pentingnya penerapan prinsip efisiensi, orientasi pada hasil, serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan organisasi publik. Konsep ini dikenal dengan *New Public Management*, yang mendorong adanya perubahan dalam cara pengelolaan sektor publik menjadi lebih profesional dan berorientasi pada kinerja.

Dalam pelaksanaannya, manajemen sektor publik tidak terlepas dari fungsi-fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut harus dijalankan secara seimbang agar program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran secara maksimal.

### *Collaborative Governance dalam Manajemen Publik*

Pendekatan *collaborative governance* merupakan salah satu konsep yang semakin penting dalam manajemen sektor publik, terutama dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan sektor publik tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai aktor.

Chris Ansell dan Alison Gash menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan suatu bentuk pengelolaan di mana lembaga pemerintah melibatkan pihak di luar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan sekadar kerja sama biasa, tetapi merupakan bagian dari proses manajemen yang terstruktur.

Keberhasilan pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti adanya komunikasi yang terbuka, tingkat kepercayaan antar aktor, komitmen terhadap tujuan bersama, serta kesamaan pemahaman mengenai arah yang ingin dicapai. Jika faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka proses kolaborasi cenderung tidak berjalan secara efektif.

### *Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Manajemen Publik*

Revitalisasi pasar tradisional dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pasar melalui perbaikan sarana fisik dan sistem manajemen. Dalam perspektif manajemen sektor publik, revitalisasi tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penataan sistem pengelolaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengaturan aktivitas para pelaku di dalam pasar.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa tujuan revitalisasi pasar adalah menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, bersih, nyaman, dan mampu bersaing dengan pasar modern. Oleh karena itu, keberhasilan revitalisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola berbagai aspek yang ada di dalam pasar, baik dari sisi fasilitas, pedagang, maupun lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, revitalisasi pasar seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan, keterbatasan sarana pendukung, serta kurang optimalnya pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada aspek fisik, tetapi juga pada kualitas pengelolaan yang dilakukan oleh pihak terkait.

### *Peran Aktor dalam Manajemen Kolaboratif*

Dalam manajemen sektor publik, keterlibatan berbagai aktor menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mencapai tujuan bersama.

Pemerintah berperan sebagai pihak yang mengoordinasikan seluruh kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Pengelola pasar bertanggung jawab dalam menjalankan operasional sehari-hari serta memastikan aktivitas pasar berjalan sesuai aturan. Pedagang memiliki

peran dalam mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, sementara sektor swasta dan masyarakat berperan sebagai pendukung dalam proses pengelolaan.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh adanya keterlibatan bersama, motivasi yang sama, serta kemampuan untuk bekerja secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas interaksi antar aktor menjadi kunci utama dalam keberhasilan manajemen kolaboratif.

***Kerangka Pemikiran***

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat dipahami bahwa revitalisasi pasar tradisional merupakan bagian dari praktik manajemen sektor publik yang membutuhkan pengelolaan secara terintegrasi. Fungsi manajemen harus dijalankan secara optimal dengan melibatkan berbagai aktor melalui pendekatan kolaboratif.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan pasar sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengoordinasikan berbagai pihak, membangun komunikasi yang efektif, serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan revitalisasi Pasar Lemabang di Kota Palembang dalam perspektif manajemen sektor publik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif, khususnya terkait proses manajerial, interaksi antar aktor, serta dinamika kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan pasar.

***Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan konteks yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan proses pengelolaan secara sistematis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana fungsi manajemen sektor publik dijalankan dalam revitalisasi pasar.

***Sumber Data***

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu:

1. **Data primer**, berupa dokumen analisis dan hasil pengamatan terkait revitalisasi Pasar Lemabang.
2. **Data sekunder**, berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, serta sumber literatur lain yang relevan dengan manajemen sektor publik dan *collaborative governance*.

Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan landasan konseptual dalam penelitian.

***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. **Studi literatur**, yaitu mengkaji berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. **Analisis dokumen**, yaitu mengkaji dokumen terkait revitalisasi Pasar Lemabang, termasuk data yang menggambarkan permasalahan, aktor yang terlibat, serta proses pengelolaan yang berlangsung.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis secara mendalam.

***Teknik Analisis Data***

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu:

1. **Reduksi data**, dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. **Penyajian data**, dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.
3. **Penarikan kesimpulan**, dengan menginterpretasikan data berdasarkan teori manajemen sektor publik dan *collaborative governance*.

Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) diterapkan dalam pengelolaan revitalisasi pasar.

***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian ini adalah pada:

1. Proses manajemen sektor publik dalam revitalisasi pasar
2. Peran aktor dalam pengelolaan kolaboratif
3. Kendala dalam implementasi manajemen
4. Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan pasar

Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pengelolaan pasar dilakukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Umum Pasar Lemabang Pasca Revitalisasi

Revitalisasi Pasar Lemabang di Kota Palembang dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional, baik dari aspek fisik maupun tata kelola. Program ini diharapkan mampu menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, serta dapat mengurangi permasalahan seperti kemacetan dan ketidakteraturan aktivitas pedagang.

Namun, berdasarkan hasil analisis, kondisi pasar setelah revitalisasi menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara fisik, memang telah dilakukan perbaikan fasilitas dan penyediaan kios bagi pedagang. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak pedagang yang memilih berjualan di badan jalan. Kondisi ini menyebabkan kemacetan di sekitar pasar tetap terjadi dan menunjukkan bahwa penataan yang dilakukan belum berjalan efektif.

Selain itu, aspek kebersihan dan keteraturan lingkungan pasar juga belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi yang dilakukan masih lebih menekankan pada pembangunan fisik, sementara aspek pengelolaan dan perilaku aktor belum ditangani secara optimal.

## Analisis Fungsi Manajemen Sektor Publik

### *Perencanaan (Planning)*

Dalam tahap perencanaan, pemerintah telah merancang program revitalisasi dengan cukup sistematis, meliputi penataan kios, pembagian zonasi pedagang, serta penyediaan fasilitas pendukung. Perencanaan ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan pasar yang lebih tertib dan terorganisir.

Namun, perencanaan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pedagang. Banyak pedagang merasa bahwa lokasi kios yang disediakan kurang strategis dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Akibatnya, muncul resistensi terhadap kebijakan relokasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi aktor utama.

### *Pengorganisasian (Organizing)*

Pengelolaan pasar melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, serta pihak pendukung lainnya. Secara struktural, hal ini mencerminkan adanya sistem manajemen kolaboratif.

Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar aktor masih belum berjalan efektif. Beberapa aktor belum menjalankan perannya secara maksimal, sehingga menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian belum mampu mengintegrasikan seluruh aktor secara optimal.

### *Pelaksanaan (Actuating)*

Pelaksanaan program revitalisasi telah dilakukan melalui penataan pedagang dan penyediaan fasilitas pasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan pelanggaran, terutama pedagang yang tetap berjualan di luar area yang telah ditentukan.

Rendahnya kepatuhan pedagang menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum mampu mengubah perilaku aktor utama dalam pasar.

***Pengawasan (Controlling)***

Pengawasan merupakan aspek yang paling lemah dalam pengelolaan Pasar Lemabang. Meskipun telah dilakukan penertiban, pelanggaran masih terus terjadi secara berulang.

Kurangnya konsistensi dalam pengawasan serta tidak adanya sanksi yang tegas menyebabkan aturan yang telah ditetapkan tidak memiliki daya paksa. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan program revitalisasi tidak berjalan optimal.

**Analisis Collaborative Governance**

***Kondisi Awal (Starting Conditions)***

Kondisi awal menunjukkan adanya ketidakteraturan pasar serta perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pedagang. Pemerintah berfokus pada penataan, sementara pedagang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi.

Perbedaan ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan sejak awal, sehingga menjadi hambatan dalam proses kolaborasi sebagaimana dikemukakan oleh Chris Ansell dan Alison Gash.

***Desain Kelembagaan (Institutional Design)***

Struktur kolaborasi telah terbentuk melalui pembagian peran antar aktor. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, sistem sudah mendukung kolaborasi.

Namun, dalam implementasinya, aturan yang ada belum dipatuhi secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan belum berjalan efektif dalam praktik.

***Kepemimpinan (Facilitative Leadership)***

Pemerintah daerah berperan sebagai penggerak utama dalam revitalisasi pasar. Namun, kepemimpinan yang ada masih cenderung bersifat top-down dan belum mampu membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi aktif dari pedagang.

Dalam konteks kolaboratif, kepemimpinan seharusnya tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memfasilitasi dan menjembatani kepentingan antar aktor.

***Proses Kolaborasi (Collaborative Process)***

Proses kolaborasi dalam pengelolaan pasar belum berjalan optimal. Komunikasi antar aktor masih terbatas, sehingga pemahaman terhadap tujuan revitalisasi belum merata.

Kepercayaan antar aktor juga masih rendah, terutama dari pedagang terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, komitmen dalam menjalankan program belum merata, sehingga kolaborasi yang terjadi masih bersifat formal dan belum substantif.

***Hasil Kolaborasi (Outcome)***

Revitalisasi telah menghasilkan beberapa perubahan, seperti perbaikan fasilitas dan upaya penataan pasar. Namun, hasil tersebut belum memberikan dampak yang signifikan.

Ketidakteraturan masih terjadi, pedagang masih berjualan di luar area, dan kemacetan belum teratasi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kolaborasi belum mencapai tujuan yang diharapkan. Dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:







***Evaluasi Keberhasilan Revitalisasi***

Berdasarkan seluruh hasil analisis, revitalisasi Pasar Lemabang dapat dikatakan belum berhasil secara optimal. Keberhasilan hanya terlihat pada aspek fisik, seperti pembangunan fasilitas dan penyediaan kios.

Namun, tujuan utama revitalisasi, yaitu menciptakan pasar yang tertib dan terkelola dengan baik, belum tercapai. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kepatuhan pedagang, lemahnya pengawasan, serta belum efektifnya koordinasi antar aktor.

Dengan demikian, revitalisasi dapat dikategorikan sebagai berhasil secara parsial, tetapi belum berhasil secara menyeluruh**.**

***Implikasi terhadap Manajemen Sektor Publik***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan revitalisasi lebih disebabkan oleh lemahnya implementasi manajemen sektor publik, bukan karena perencanaan yang buruk.

Fungsi manajemen seperti koordinasi, komunikasi, dan pengawasan belum berjalan optimal. Selain itu, pendekatan *collaborative governance* yang digunakan belum efektif karena rendahnya kepercayaan, kurangnya komitmen, dan tidak adanya pemahaman bersama antar aktor.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam manajemen kolaboratif agar pengelolaan pasar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

# KESIMPULAN DAN SARAN

**Kesimpulan**

Revitalisasi Pasar Lemabang di Kota Palembang merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pasar tradisional melalui perbaikan fisik dan penataan sistem manajemen. Secara konseptual, program ini telah dirancang dengan cukup baik dan melibatkan berbagai aktor, yang menunjukkan adanya penerapan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaannya.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, revitalisasi tersebut **belum berhasil secara optimal**. Keberhasilan yang dicapai masih terbatas pada aspek fisik, seperti pembangunan fasilitas dan penyediaan kios. Sementara itu, tujuan utama revitalisasi, yaitu menciptakan pasar yang tertib, nyaman, dan terkelola dengan baik, belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya pedagang yang berjualan di badan jalan, kemacetan yang belum teratasi, serta rendahnya kepatuhan terhadap aturan.

Dari perspektif manajemen sektor publik, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen belum berjalan secara maksimal. Perencanaan yang dilakukan belum sepenuhnya partisipatif, pengorganisasian belum mampu mengintegrasikan aktor secara efektif, pelaksanaan belum didukung oleh kepatuhan pedagang, serta pengawasan masih lemah dan tidak konsisten. Kelemahan dalam fungsi manajemen tersebut menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan program.

Sementara itu, dari perspektif *collaborative governance*, meskipun struktur kolaborasi telah terbentuk, proses kolaborasi belum berjalan efektif. Rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor, kurangnya komunikasi yang intensif, tidak meratanya komitmen, serta belum tercapainya pemahaman

bersama menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kolaborasi. Akibatnya, kerja sama yang terjalin masih bersifat formal dan belum mampu menghasilkan sinergi yang kuat.

Dengan demikian, revitalisasi Pasar Lemabang dapat dikategorikan sebagai **berhasil secara parsial, tetapi belum berhasil secara menyeluruh**, karena masih terdapat kelemahan dalam implementasi manajemen sektor publik dan belum optimalnya penerapan *collaborative governance*.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pasar Lemabang di masa mendatang.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi manajemen sektor publik, khususnya dalam aspek pengawasan. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan disertai dengan penerapan sanksi yang tegas agar dapat meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Kedua, perencanaan program revitalisasi ke depan perlu dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan pedagang sejak tahap awal. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, sehingga mengurangi resistensi terhadap program.

Ketiga, koordinasi dan komunikasi antar aktor perlu ditingkatkan melalui forum dialog yang berkelanjutan. Komunikasi yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan dan menciptakan pemahaman bersama mengenai tujuan revitalisasi.

Keempat, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan kepemimpinan yang lebih fasilitatif, yaitu tidak hanya mengarahkan, tetapi juga mampu menjembatani kepentingan berbagai aktor. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi aktif dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan pasar.

Kelima, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan edukasi kepada pedagang mengenai pentingnya ketertiban dan pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, diharapkan pedagang dapat lebih kooperatif dalam mendukung program revitalisasi.

Dengan adanya perbaikan dalam aspek manajemen dan kolaborasi tersebut, diharapkan pengelolaan Pasar Lemabang dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan

## REFERENCES


Badan Pusat Statistik. (2023). *Kota Palembang dalam Angka*. Palembang: BPS.

Chris Ansell, & Alison Gash. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543– 571.

Christopher Hood. (1991). *A Public Management for All Seasons?*. Public Administration, 69(1), 3–19.

David Osborne, & Ted Gaebler. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Pedoman Teknis Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Revitalisasi Pasar Rakyat*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.

Kirk Emerson, Tina Nabatchi, & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework for Collaborative Governanæ*. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pemerintah Kota Palembang. (2023). *Dokumen Revitalisasi Pasar Lemabang*. Palembang.